

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses menuju perubahan yang diupayakan suatu negara secara terus menerus dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya sehingga kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat. Menurut Todaro (2003), pembangunan dipahami sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara (Jonaidi, 2012). Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Menurut Todaro dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terdapat tiga komponen penentu utama yaitu : (i) akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia; (ii) pertumbuhan penduduk yang meningkatkan jumlah angkatan kerja ditahun-tahun mendatang; (iii) kemajuan teknologi.

Menurut Jhingan (2003) pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor ekonomi maupun faktor nonekonomi. Salah satu faktor nonekonomi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ialah demografi atau faktor kependudukan. Menurut Sofyardi dan Helmi (2013) masalah

penduduk terkait dengan jumlah, komposisi dan distribusi penduduk. Dalam proses pembangunan ekonomi, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan. Penekanan pada faktor demografi didalam kerangka pembangunan baik daerah maupun nasional karena penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijaksanaan dan program pembangunan yang dilakukan sehingga posisi penduduk di dalam pembangunan dapat sebagai subyek pembangunan yaitu sebagai input dalam faktor produksi berupa penyediaan tenaga kerja yang akan digunakan di dalam proses produksi dan sebagai obyek pembangunan yaitu sebagai konsumen yang menggunakan berbagai sumber daya ekonomi. Sehingga keadaan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan pemerintah. Oleh karena itu kebijakan dan program kependudukan, tidak semata-mata hanya sebagai upaya untuk mengetahui pola dan arah demografi tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang (Tjiptoherijanto, 2000).

Dalam menunjang proses pembangunan, permasalahan penduduk tidak saja diarahkan pada upaya pengendalian penduduk tetapi juga dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, semakin besar jumlah penduduk yang berkualitas rendah, semakin berat beban yang harus diemban dalam peningkatan mutu modal manusia. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai kependudukan merupakan dasar utama dalam melakukan kegiatan pembangunan, baik dari segi perencanaan maupun evaluasi pembangunan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional

dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat daerah. Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah (*Value Added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam daerah tertentu, PDRB harga konstan merupakan tolok ukur yang paling mendekati dalam menghitung pertumbuhan ekonomi, karena PDRB harga konstan merupakan perkembangan produksi riil suatu daerah tanpa memasukkan unsur inflasi.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, dari perhitungan BPS pada tahun 2010 jumlah penduduk di Indonesia sejumlah 237.641.326 jiwa yang menjadikannya sebagai negara dengan penduduk terbanyak ke-4 di dunia setelah Republik Rakyat Cina, India dan Amerika Serikat, namun dalam arah sasaran pembangunan Indonesia dan pertumbuhan ekonomi ternyata belum dapat mengimbangi peningkatan jumlah penduduk tersebut. Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang tergolong cukup tinggi yakni sebesar 1,49 persen selama periode tahun 2000-2010 dan turun menjadi 1,40 persen selama periode 2010-2014. Meskipun mengalami penurunan pada empat tahun terakhir, angka ini masih tergolong cukup tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan pada negara maju yang memiliki laju pertumbuhan pertumbuhan penduduk sebesar 0,1 persen tiap tahunnya.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang pada tahun 2015 memiliki jumlah penduduk sebesar 5.196.289 jiwa dan bukan merupakan daerah yang paling tinggi jumlah penduduknya, namun hanya peringkat terbesar kelima jika dibandingkan dengan sembilan provinsi lain di pulau Sumatera. Namun jumlah penduduk yang tergolong rendah tidak selalu menciptakan pendapatan perkapita yang tinggi. Dalam kurun waktu lima tahun

terakhir yakni tahun 2012-2015, tingkat pendapatan perkapita provinsi Sumatera Barat cenderung meningkat dimana pada tahun 2012 pendapatan perkapita Sumatera Barat sebesar 23.744.010 rupiah meningkat menjadi 24.857.640 rupiah pada tahun 2013. Peningkatan ini terus terjadi hingga tahun 2015 sebesar 27.004.080 rupiah. Namun dilihat dari nilai rata-rata angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Sumatera bahkan berada dibawah nilai rata-rata PDRB perkapita pada sepuluh provinsi di pulau Sumatera yakni sebesar 28.994.136 rupiah atau berada pada urutan keempat terendah. Hal tersebut jelas mengindikasikan masih rendahnya kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat.

Sedangkan jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat bukan termasuk kedalam daerah dengan pertumbuhan terendah, karena laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat menempati urutan ketiga terbesar setelah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau. Namun permasalahannya adalah laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka yang semakin menurun, yang mana pada tahun 2011 laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yakni sebesar 6,34 persen turun menjadi 6,31 persen pada tahun 2012. Angka ini kembali mengalami penurunan pada tahun berikutnya menjadi 6,08 persen dan terus menurun hingga pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar 5,41 persen. Jika dilihat dari rata-rata selama kurun waktu empat tahun terakhir yakni tahun 2011-2015 tersebut maka laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat hanya sebesar 5,92 persen.

Penekanan pada variabel-variabel demografi sehubungan dengan kondisi demografi Sumatera Barat yang ditandai oleh sangat timpangnya distribusi

penduduk antar kabupaten dan kota, tingginya beban ketergantungan usia muda (*dependency ratio*) serta rendahnya kualitas sumber daya manusia yang mencerminkan kualitas tenaga kerja dalam menghasilkan output daerah. Ketimpangan yang terjadi pada variabel demografi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti laju pertumbuhan penduduk dan migrasi yang tinggi antar daerah. Laju pertumbuhan penduduk Sumatera Barat selama kurun waktu empat tahun terakhir yakni tahun 2012-2015 menunjukkan angka yang cukup tinggi sebesar 1.65 persen. Hal ini disebabkan oleh tingginya angka kelahiran (fertilitas) dan rendahnya angka kematian (mortalitas) di Sumatera Barat. Disamping itu terkait dengan aktivitas migrasi, di Sumatera Barat terdapat salah satu etnis yang dikenal memiliki mobilitas dengan intensitas tinggi yakni etnis Suku Minangkabau. Aktivitas migrasi ini lebih dikenal dengan istilah *merantau*.

Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap struktur penduduk antara penduduk usia produktif dan penduduk usi non-produktif yang tercermin dalam angka *dependency ratio*. *Dependency ratio* merupakan rasio antara kelompok penduduk usia non produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun keatas) dengan kelompok penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi. Semakin tinggi angka *dependency ratio* menunjukkan semakin besar beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif karena sebagian pendapatannya digunakan untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka *dependency ratio* pada masing-masing kabupaten/kota

di Sumatera Barat selalu mengalami penurunan tiap tahunnya, namun jika dilihat dari nilai rata-rata masih cukup tinggi yakni sebesar 57,12 artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif akan menanggung beban 57 orang penduduk usia nonproduktif . Selain itu kesenjangan rasio ketergantungan penduduk antar daerah di Sumatera Barat juga cukup tinggi. Selama empat tahun terakhir yakni tahun 2012-2015 Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah yang memiliki angka ketergantungan penduduk usia nonproduktif paling tinggi yakni sebesar 64,93. Artinya 100 orang penduduk usia produktif di Kepulauan Mentawai akan menanggung 65 orang penduduk usia nonproduktif. Sedangkan daerah dengan rasio ketergantungan paling rendah yakni sebesar 42,83.

Selain itu faktor alam dan lingkungan juga dapat berpengaruh terhadap dinamika kependudukan suatu daerah. Suatu daerah yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi akan menyebabkan terjadinya pemusatan kegiatan ekonomi dan penduduk. Hal ini akan menyebabkan perbedaan kepadatan penduduk pada masing-masing daerah. Bila dilihat dari luas wilayah dan penyebaran penduduk terlihat tidak merata di 19 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat.

Berdasarkan data BPS konsentrasi utama penduduk Sumatera Barat yakni berada di Kota Padang yang merupakan ibu kota provinsi, dimana pada tahun 2015 sebesar 17,37 persen penduduk terkonsentrasi di Kota Padang sedangkan daerah dengan konsentrasi penduduk yang paling rendah yakni Kota Padang Panjang sebesar 0,98 persen. Namun, jika dilihat dari kepadatan penduduk pada masing-masing daerah Kota Bukittinggi merupakan daerah terpadat di Sumatera Barat dengan jumlah penduduk sebesar 4.858 jiwa/km² yang diikuti oleh Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh sebagai daerah terpadat kedua dan ketiga

dengan jumlah penduduk secara berturut-turut yakni sebesar 2.212 jiwa/km² dan 1.589 jiwa/km². Perbedaan antara konsentrasi penduduk dan kepadatan penduduk ini disebabkan oleh perbedaan luas wilayah pada masing-masing daerah.

Kepadatan penduduk yang tinggi di suatu daerah akan memberikan kosekuensi jumlah tenaga kerja yang semakin meningkat pada daerah tersebut. Semakin meningkat jumlah tenaga kerja di suatu daerah maka output yang dihasilkan juga akan meningkat, sebaliknya kepadatan penduduk yang rendah menggambarkan bahwa jumlah tenaga kerja yang tersedia juga semakin menurun maka output yang dihasilkan juga semakin menurun. Jumlah tenaga kerja terserap yang dicerminkan oleh jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam berbagai sektor usaha pada setiap daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat berfluktuasi setiap tahunnya. Namun secara rata-rata jumlah tenaga kerja yang bekerja di Sumatera Barat mengalami peningkatan yang mana pada tahun 2012 sebesar 2.037.642 jiwa tenaga kerja meningkat menjadi 2.184.699 jiwa tenaga kerja pada tahun 2016.

Selain itu faktor demografi yang dapat mempengaruhi faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi yakni kualitas sumber daya manusia. Indeks pembangunan manusia (IPM) dijadikan sebagai ukuran kualitas modal manusia yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang dikombinasikan. Dan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antar daerah. Kota Padang sebagai ibu kota provinsi merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian Sumatera Barat memiliki kualitas sumber daya manusia yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang dicerminkan oleh nilai indeks pembangunan manusia (IPM) yakni sebesar 80,36 persen pada tahun 2015 sedangkan daerah yang memiliki kualitas sumber daya manusia paling rendah di Sumatera Barat ialah Kabupaten Kepulauan Mentawai yakni sebesar 57,41 persen pada tahun yang sama.

Berdasarkan pemaparan diatas, mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor demografi terhadap perkembangan ekonomi penting untuk diteliti karena menyangkut dengan intervensi pemerintah serta kebijakannya pada keadaan demografi (kependudukan) dan kualitas manusia. Oleh karena itu, penulis meneliti mengenai hubungan tersebut dengan judul : **“Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Demografi Terhadap Perkembangan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2015”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh rasio ketergantungan penduduk (*dependency ratio*) terhadap perkembangan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh kepadatan penduduk terhadap perkembangan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat?

3. Bagaimana pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap perkembangan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat?
4. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap perkembangan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh rasio ketergantungan penduduk (*dependency ratio*) terhadap perkembangan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh kepadatan penduduk terhadap perkembangan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk menganalisis pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap perkembangan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat.
4. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap perkembangan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna sebagai input dan dasar pertimbangan bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan yang tepat terutama dalam masalah kependudukan yang berkaitan dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penyerapan tenaga kerja.
2. Bagi penulis, dapat meningkatkan pengetahuan dan pendalaman mengenai seberapa besar faktor-faktor demografi (kependudukan) mempengaruhi

perkembangan ekonomi dan peningkatan output daerah yang dilihat dari PDRB harga konstan.

3. Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembandingan untuk meneliti topik yang sama bagi penelitian selanjutnya.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Topik utama penelitian ini adalah faktor demografi dan perkembangan ekonomi yang digambarkan oleh PDRB harga konstan dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) model *within group* atau tanpa menggunakan *dummy variable*. Variabel dalam penelitian ini adalah, rasio ketergantungan penduduk (*dependency ratio*), kepadatan penduduk, penyerapan tenaga kerja dan indeks pembangunan manusia (IPM). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data panel yang terdiri atas data *time series* dan data *cross ssection* 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dengan periode penelitian selama empat tahun yakni dari tahun 2012 hingga 2015.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun sedemikian rupa agar mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari enam sub bab yakni menjelaskan latar belakang, dari latar belakang maka diperoleh rumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah maka akan diperoleh tujuan penelitian, manfaat penelitian dan ruang lingkup penelitian. Pada sub bab terakhir akan diuraikan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dan mendukung sebagai dasar yang digunakan dalam penelitian ini sehingga tercapainya hasil penelitian yang ilmiah. Dalam bab ini juga dicantumkan penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian sehingga dapat membantu penulisan. Pada bab ini juga dikemukakan kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Diantaranya yakni definisi operasional variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode analisis data dan metode pengujian data.

BAB IV : Gambaran Umum Daerah Penelitian

Bab ini menjelaskan kondisi umum daerah penelitian dan perkembangan variabel-variabel yang digunakan dalam model penelitian baik variabel dependen maupun independen. Dimana dalam penelitian ini menjelaskan perkembangan ekonomi yang digambarkan oleh PDRB harga konstan, rasio ketergantungan penduduk (*dependency ratio*), kepadatan penduduk, penyerapan tenaga kerja dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

BAB V : Temuan Empiris dan Implikasi Kebijakan

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang terdiri dari hasil pengolahan data dan menginterpretasikan hasil yang diperoleh serta merumuskan kebijakan apa yang perlu dan bisa diambil dalam penelitian ini.

BAB VI : Penutup

Bab ini berisikan tentang kesimpulan singkat dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan dan juga saran-saran mendukung yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu berkaitan dengan tema dan hasil penelitian.

